

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dibentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) oleh pemerintah merupakan salah satu usaha untuk memandirikan desa dalam mengatur perekonomian desa. Membangun daerah pedesaan yang dapat dicapai melalui pemberdayaan masyarakatnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat adalah salah satu misi pemerintah yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 (Anggraeni, 2016).

Badan usaha milik desa (BUMDes) merupakan salah satu instrument penting dalam meningkatkan perekonomian desa melalui pengelolaan potensi lokal. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, tata kelola bumdes yang baik menjadi kunci utama. Tata kelola bumdes mencakup perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pengawasan pengguna dana yang dikelola BUMDes.

Bumdes merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Semenjak dikeluarkannya Undang-Undang no 6 tentang Desa tahun 2014, BUMDes menjadi salah satu alat pembangunan di desa untuk meningkatkan perekonomian desa, peningkatan pendapatan desa, meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta diharapkan dapat menjadi tulang pertumbuhan dan punggung pemerataan ekonomi desa (Pratama & Pambudi, 2017).

Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) sebagai bagian dari sumber pendapatan asli desa yang diharapkan dapat mendorong desa untuk mengelola sumber daya

termasuk pembangunan ekonomi, dan mendorong pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam pengelolaan pemerintahan desa sehingga BUMDes perlu dibentuk untuk mengelola perekonomian masyarakat pedesaan (Atipah, 2020).

Peranan BUMDes merupakan membangun serta meningkatkan kemampuan serta keahlian ekonomi warga desa, pada biasanya buat tingkatan kesejahteraan ekonomi serta sosialnya, berfungsi secara aktif dalam upaya mempertinggi mutu kehidupan manusia serta warga, memperkokoh perekonomian rakyat selaku bawah kekuatan serta ketahanan perekonomian, berusaha untuk mewujudkan serta meningkatkan perekonomian warga desa, menolong para warga buat tingkatan penghasilannya sehingga bisa tingkatan pemasukan serta kemakmuran warga (Nugrahaningsih et al., 2016).

Penerapan tata kelola yang sesuai dengan prinsip *good governance* belum banyak di terapkan di BUMDes karena masih minimnya sumber daya manusia yang memadai. Seperti yang terjadi pada salah satu BUMDes di daerah Gaura, yang terletak di Desa Gaura, Kecamatan Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Indonesia. Kurang transparannya BUMDes tersebut dalam mengelola aset ekonomi membuat banyak pihak mulai hilang kepercayaan. Berpijak kepada AD/ART yang ada, BUMDes tersebut mestinya taat dan patuh kepada aturan yang sudah disepakati. Selain itu, kurang bertanggung jawabnya pihak-pihak yang terkait.

Peningkatan pengelola dapat diukur melalui penilaian kinerja dan umpan balik yang spesifik dari hasil penilaian kinerja memungkinkan organisasi untuk membuat program pembinaan bahkan sampai kepada program pengembangan karir bagi pegawai berprestasi (Hasibuan, 2013). Kinerja BUMDes bisa tingkatan

pemasukan serta kemakmuran warga bergantung pada sumber energi manusia dalam anggota, pegawai, ataupun pengelola dalam mengerjakan tugas serta tanggung jawab dalam mengelola sumber energi yang lain yang terdapat dalam organisasi ditetapkan oleh peranan berarti anggota dalam sesuatu organisasi yang jadi perencana serta pelakon aktif dalam tiap kegiatan organisasi.

Desa Gaura di Kecamatan Laboya Barat, Kabupaten Sumba barat, memiliki potensi besar untuk mengembangkan perekonomian melalui BUMDes. Namun masalah pada saat ini masi terdapat berbagai tantangan yang dihadapi bumdes desa gaura, seperti kurang optimal pengelolaan dana, minimnya transparansi, dan lemahnya akuntabilitas. Hal ini berdampak pada kinerja BUMDes dalam memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam untuk memahami pengaruh tata kelola BUMDes di Desa Gaura.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih (2014) ditemukan bahwa buruknya kinerja BUMDes ini disebabkan oleh tidak mampunya pengelola dalam mencapai nilai efisiensi, efektivitas, dan responsivitas. Hal tersebut ditandai dengan kurang optimalnya sumber daya lokal desa dalam pengelolaan BUMDes serta lemahnya peran masyarakat desa dalam pengelolaan BUMDes. Menurut Sofyani, et al. (2019) faktor-faktor yang dapat membantu keberhasilan dari kinerja BUMDes ialah adanya jiwa patriotisme semangat, adanya keterampilan, dilakukannya pelatihan, tingkat pendidikan, pengalaman, kejujuran (perilaku etis), adanya rasa tanggung jawab, keseriusan, kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat, kerja tim yang baik, komunikasi yang transparan antara manajer BUMDes, sikap pantang menyerah dalam upaya mencapai target kinerja,

religiusitas, kepuasan kerja, gaya kepemimpinan visioner (*transformasional*), kehadiran mekanisme insentif.

Penelitian yang tentang hubungan prinsip tata kelola dan kinerja BUMDes ini masih sangat sedikit dilakukan di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa BUMDes ini memerlukan perhatian berdasarkan hasil khusus. Penelitian-penelitian terdahulu dapat dilihat bahwa penelitian mengenai hubungan tata kelola (*good governance*) dengan kinerja kebanyakan dilakukan di organisasi lain seperti perusahaan dan lembaga pemerintahan (Titin & Amin, 2017). Melihat fenomena BUMDes yang cukup masih dan penelitian yang jarang dilakukan, maka penelitian terkait investigasi pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan perannya terhadap kinerja BUMDes penting untuk dilakukan.

Menurut Siahaan (2010) pengerjaan sesuatu yang sesuai dengan bidangnya merupakan tindakan yang profesionalitas. Adapun tindakan profesionalitas merupakan salah satu faktor penting yang menyebabkan suatu kinerja organisasi menjadi berkualitas. Berbeda dengan Riantiarno & Azlina (2011) yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan dan sistem hukum yang berlaku di suatu Negara dapat dijadikan sebagai pegangan dalam pelaksanaan kegiatan organisasi. Segala sesuatu aktivitas yang didasarkan pada peraturan perundangan, termasuk didalamnya aturan-aturan yang terkait dengan peraturan dari organisasi sebaiknya ditaati untuk mencapai tujuan organisasi tanpa cacat. Hal ini disebabkan karena ketaatan terhadap perundangan atau hukum yang berlaku mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja suatu instansi atau organisasi.

Menurut Siegar Sasmita (2023) penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan BUMDes dan apa saja usaha yang dijalankan BUMDes di desa Melati II, Kecamatan Perbaungan. Lokasi penelitian ini di Desa Melati II Kecamatan Perbaungan. Penentuan jumlah sampel menggunakan kuota sampling dengan jumlah sampel 36 orang. Metode analisis data menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa apabila dilihat dari segi dimensi ekonomi menunjukkan bahwa sebanyak 69,4 % responden menilai bahwa BUMDes di desa Melati II berjalan dengan sangat baik. Hal ini terlihat dengan adanya kontribusi BUMDes dalam peningkatan jumlah tenaga kerja. Jika dilihat dari segi dimensi lingkungan BUMDes di desa Melati II berjalan dengan baik. Hal ini terbukti dengan adanya pengelolaan saluran irigasi menjadi sektor wisata tani, sehingga kondisi areal persawahan menjadi lebih tertata dengan baik. Dapat disimpulkan bahwa perkembangan BUMDes di desa Melati II tergolong baik. Hal ini terlihat dari jawaban responden mengenai beberapa indikator perkembangan BUMDes yakni dimensi sosial, dimensi lingkungan, dimensi ekonomi dan dimensi manajemen berada pada kategori baik- sangat baik. Dalam menjalankan programnya BUMDes memanfaatkan sektor pertanian sebagai sektor wisata yang merupakan potensi terbesar di desa Melati II.

Sedangkan menurut Maulana Alwan Muhammad (2023) tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui efektivitas pengelolaan BUMDes di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan untuk mengetahui upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi faktor-faktor yang menghambatnya. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan

dokumentasi. Teknik penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling terdapat informan berjumlah 18 orang. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Pada Desa Danau Cermin, Desa Harusan, dan Desa Sungai Baring) belum berjalan baik. Hal ini dapat dilihat dari aspek sumber daya manusia, kualitas barang atau jasa yang dihasilkan, keuntungan yang diperoleh, target kerja, sosialisasi, prosedur kerja yang diambil, dan perumusan program kerja. Sedangkan aspek yang sudah berjalan baik adalah sarana dan prasarana, kuantitas barang atau jasa yang dihasilkan, waktu yang diperlukan. Disamping itu faktor penghambat dalam efektivitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Pada Desa Danau Cermin, Desa Harusan, dan Desa Sungai Baring) yaitu: kurangnya perawatan terhadap sarana dan prasarana. Adapun faktor pendorong yaitu: kuantitas barang atau jasa dari yang telah dihasilkan cukup bagus serta waktu yang dibutuhkan. cukup cepat untuk pengguna jasa atau layanan BUMDes

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Cahyani, Guspul & Wijayanti (2019) pada BUMDes Srikandi Desa Ropoh, Kabupaten Wonosobo menyatakan bahwa keberadaan BUMDes adalah penting sebagai program baru dalam usaha meningkatkan perekonomian desa berdasarkan kebutuhan masyarakat dan potensi desa, oleh desa, dan untuk desa. Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik mengambil judul **TATA KELOLA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)**

**(STUDI DI DESA GAURA, KECAMATAN LABOYA BARAT,
KABUPATEN SUMBA BARAT)**

1.2. Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah dalam penelitian ini adalah Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Gaura, Kecamatan Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat.

1.3. Persoalan Penelitian

1. Bagaimana Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Gaura, Kecamatan Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat?
2. Bagaimana dampak tata kelola badan usaha milik desa (BUMDes) terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa Gaura, Kecamatan Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat?

1.4. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

- 1 Untuk mengetahui Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Gaura, Kecamatan Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat.
- 2 Untuk mengetahui dampak-dampak dalam Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Gaura Kecamatan Laboya Barat Kabupaten Sumba Barat

b. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik

Hasil penelitian yang di lakukan di harapkan dapat menjadi tambahan ilmu dan pengalaman untuk mengaplikasikan berbagai teori yang telah dipelajari, kemudian dapat berguna dalam pengembangan diri.

Manfaat bagi mahasiswa yaitu dapat dijadikan referensi dalam mengerjakan tugas khususnya yang berkaitan dengan tata kelola badan usaha milik desa (BUMDes) yaitu dapat menjadi referensi dan acuan bagi peneliti selanjutnya agar dikembangkan lebih lanjut khususnya dari jenis penelitian yang sesuai.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan untuk mengambil keputusan serta berbagai tambahan referensi di masa yang akan datang dalam hal ini dalam tata kelola badan usaha milik desa (BUMDes) di Desa Gaura, Kecamatan. Laboya Barat, Kabupaten. Sumba Barat